



# SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN

## RENCANA KERJA TAHUN 2026



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN  
TAHUN 2025



**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 304 /2025**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2026**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa sehubungan telah diundangkannya Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, perlu dilakukan penyesuaian pada rencana kerja perangkat daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Kerja Kabupaten Seruyan Tahun 2026;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 120);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 79), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
15. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 21).


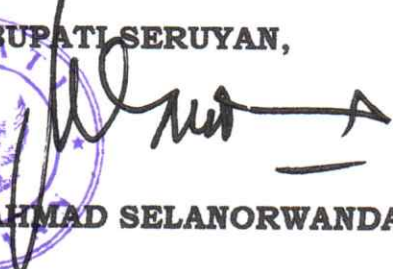
**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026;
- KETIGA** : Sistematisa penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** yaitu sebagai berikut:
- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
- BAB V : PENUTUP.

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 29 Juli 2025

 **BUPATI SERUYAN,**  
  
**AHMAD SELANORWANDA**

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN**  
**NOMOR 100.3.3.2/ 304 /2025**  
**TANGGAL 29 Juli 2025**  
**TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN 2026**

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
1	Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan
5	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seruyan
8	Dinas Sosial Kabupaten Seruyan
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan
15	Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan
21	Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan
22	Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan
26	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan
28	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
30	Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan
31	Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan
32	Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan
33	Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan
34	Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan
35	Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan
36	Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan
37	Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan
38	Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan
39	Kecamatan Suling Tambun Kabupaten Seruyan



BUPATI SERUYAN,

AHMAD SELANORWANDA

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan karuniaNya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026 dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan Sekretariat Daerah selama satu tahun yang akan datang. Penyusunan Rencana Kerja ini mengacu pada dokumen Ranwal Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah memberikan pedoman bagi semua unit kerja, pimpinan dan staf di lingkungan Sekretariat Daerah untuk melaksanakan secara akuntabel yang berorientasi pada peningkatan kinerja untuk menjamin keberhasilan program dan kegiatan.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan di masa yang akan datang pada khususnya.

Kuala Pembuang, 29 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN



**Drs. H. DJAINUDDIN NOOR, M.A.P.**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19650821 199103 1 013

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>5</b>
1.1 Latar Belakang .....	5
1.2 Landasan Hukum .....	6
1.3 Maksud dan Tujuan .....	9
1.4 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II    EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SETDA TAHUN LALU .....</b>	<b>11</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	12
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	14
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ....	40
<b>BAB III   TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>41</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	41
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah .....	43
<b>BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.</b>	<b>45</b>
4.1 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan .....	45
<b>BAB V    PENUTUP .....</b>	<b>46</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel E-81	Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan TRIWULAN IV Tahun 2024 .....	11
Tabel 2.3	Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan .....	18
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan .....	20
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan .....	43
Tabel 4.1	Matrik Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 .....	45

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan Tupoksi dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Seruyan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 – 2029 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025–2029.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan setiap tahun anggaran diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan oleh Sekretariat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dengan mengacu kepada Renstra Sekretariat Daerah sebagaimana diamanatkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah perlu diawali dengan menyusun Rencana Kerja mengingat bahwa :

1. RENJA-Sekretariat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), RENSTRA-Sekretariat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat;
2. RENJA-Sekretariat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan mendorong menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat;
3. RENJA secara bottom up di bahas dalam forum Perangkat Daerah yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan dalam

- rangka menentukan prioritas kegiatan pembangunan yang mengarah terhadap pelayanan kebutuhan masyarakat dan wilayah;
4. RENJA-Sekretariat Daerah akan digunakan pada pelaksanaan Musrenbang RKPD, karena Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan untuk keterpaduan antar RENJA Perangkat Daerah dan antar RKPD Kabupaten;
  5. RENJA-Sekretariat Daerah walaupun penyusunannya berpedoman pada RKPD namun tetap bahwa RENJA Sekretariat Daerah sebagai bahan dalam rangka penyusunan rancangan RKPD dan rancangan akhir RKPD.

Selain itu RENJA –Sekretariat Daerah juga merupakan suatu dokumen rencana yang menjadi bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA - PD), yang selanjutnya setelah tersusun RAPBD dan APBD dengan Peraturan Daerah maka akan menjadi dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA - PD) sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh PD yang bersangkutan.

Kejelasan dan logisnya kegiatan yang sesuai dengan TUPOKSI disertai alokasi biayanya yang tepat dan terarah dengan memperhatikan pelayanan publik, harus tertuang dalam RENJA, karena RENJA dalam pelaksanaan program pembangunan daerah merupakan suatu dokumen pengantar terhadap penganggaran pembangunan daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
  17. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 10);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
  19. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 21);
  20. Keputusan Bupati Seruyan Nomor :100.3.3.2/304/2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Renja – Setda Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

## 1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Setda Kabupaten Seruyan Tahun 2026 adalah untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Renstra Setda Kabupaten Seruyan Tahun 2025–2029 kedalam rencana program, kegiatan dan penganggaran sesuai kondisi dan kebutuhan. Lebih jauh lagi penyusunan renja sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) pada setiap tahun anggaran yang akan dilaksanakan, serta dapat menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

## 2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026 adalah :

- a. Menyediakan acuan/pedoman resmi dalam menyusun dan mensinkronkan seluruh rencana pembangunan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan dan RPJMD Kabupaten Seruyan;
- b. Untuk mengidentifikasi rencana pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026 berdasarkan kebijakan, evaluasi periode sebelumnya, permasalahan obyektif yang dihadapi, rencana kinerja, rencana biaya serta lokasi dan kelompok sasaran;
- c. Menyediakan tolok ukur untuk penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan;
- d. Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan;
- e. Memberikan pedoman Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya;
- f. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan yang dapat diukur dan dievaluasi secara obyektif.

#### **4.1 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penyusunan Renja Tahun 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan, berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- 4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

##### **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis. Pencapaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dan evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Beberapa perubahan terhadap penyusunan program dan kegiatan pun terus dilakukan seiring dilaksanakannya penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029, sehingga pada penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 merupakan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat daerah tahun sebelumnya terdapat program dan kegiatan yang tidak dapat dibandingkan capaian tahun sebelumnya dengan perkiraan tahun perencanaan maupun tahun berjalan. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel E-81 berikut :

**FORMULIR E.81**  
**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SEKRETARIAT DAERAH**  
**KABUPATEN SERUYAN**  
**TRIWULAN II TAHUN 2025**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 s/d Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung Jawab
			k	Rp	k	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp			K	Rp	
1	4	5	6		7		8		9		10		13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 7 + 13		15 = (14/6) * 100		16
			k	Rp	k	Rp	K	Rp	k	Rp	k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																			
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>																			
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>																			
<b>CUKUPAN LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																			
<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																			
<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>																			
<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</b>																			
<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</b>																			
<b>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</b>																			
<b>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</b>																			
<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>																			
<b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																			
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																			
<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>																			
<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>																			
<b>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>																			
<b>Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah</b>																			
<b>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</b>																			
<b>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</b>																			
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																			
<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>																			
<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>																			
<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>																			
<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>																			
<b>Fasilitas Kunjungan Tamu</b>																			
<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>																			
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>																			
<b>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>																			
<b>Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>																			
<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>																			

**SETDA**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 s/d Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung jawab	
			6	7	8	9	10		13 = 9 + 10 + 11 + 12	14 = 7 + 13	15 = (14/6) * 100									
							I	II			16	17								
1	4	5	6	7	8	9	10	13 = 9 + 10 + 11 + 12	14 = 7 + 13	15 = (14/6) * 100	16									
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah</b>																		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	79.200.000,00	12	-	12	26.400.000,00	4		4	Laporan	10.000.000,00	8	10.000.000,00	20	10.000.000,00	55,56	Laporan	12,63
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	3.300.000.000,00	12	555.874.384,00	12	1.100.000.000,00	4	137.014.831,00	4	Laporan	147.187.687,00	8	284.202.518,00	20	840.076.902,00	55,56	Laporan	25,46
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	150.000.000,00	12	252.468.500,00	12	50.000.000,00	4	15.000.000,00	4	Laporan	4.048.000,00	8	19.048.000,00	20	271.516.500,00	55,56	Laporan	181,01
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	16.326.045.000,00	12	4.365.945.540,00	12	5.442.015.000,00	4	410.929.630,00	4	Laporan	832.480.880,00	8	1.243.410.510,00	20	5.609.356.050,00	55,56	Laporan	34,36
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai dengan RKPMD Perangkat Daerah</b>																		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	90	2.814.000.000,00	25	518.906.779,58	30	938.000.000,00	8	106.250.000,00	10	unit	-	18	106.250.000,00	43	625.156.779,58	47,78	Unit	22,22
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	129	2.400.000.000,00	10	244.988.150,00	43	800.000.000,00	15		20	unit	-	35	-	45	244.988.150,00	34,88	Unit	10,21
	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Aset tetap lainnya yang Dipelihara	300	270.000.000,00	10	-	100	90.000.000,00	30	11.150.000,00	32	unit	6.900.000,00	62	18.050.000,00	72	18.050.000,00	24,00	Unit	6,69
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	-	-	0	-	0	0				-	0	-	0	-	-	Unit	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	-	1.118.684.650,00	0	-	0	0				-	0	-	0	1.118.684.650,00	-	Unit	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36	526.952.118,00		848.500.000,00	12	159.730.821,00	4		4	unit	410.295.000,00	8	410.295.000,00	8	1.258.795.000,00	22,22	Unit	238,88
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>																		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6	1.452.320.862,00		-	2	266.106.954,00	1		2	orang	59.287.877,00	3	59.287.877,00	3	59.287.877,00	50,00	Orang	4,06
	Penyediaan Pakelan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakelan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6	350.000.000,00		-	2	50.000.000,00	1		1	orang	139.083.000,00	2	139.083.000,00	2	139.083.000,00	33,33	Paket	39,74
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6	1.000.000.000,00	4	127.000.000,00	2	200.000.000,00	1		1	orang	194.200.000,00	2	194.200.000,00	6	321.200.000,00	100,00	Orang	32,12
	<b>Kegiatan Fasilitas Kerumahtangga Sekretariat Daerah</b>	<b>Jumlah paket fasilitas kerumahtangga Sekretariat Daerah yang disediakan</b>																		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	36	1.660.000.000,00	12	899.865.866,00	12	200.000.000,00	3	60.582.793,00	3	Paket	367.921.884,00	6	428.504.677,00	18	1.328.370.543,00	50,00	Paket	80,02
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	36	1.123.796.655,00	12	48.707.172,00	12	50.000.000,00	3	21.225.990,00	3	Paket	136.241.623,00	6	157.467.603,00	18	206.174.775,00	50,00	Paket	18,35
	<b>Kegiatan Penataan Organisasi</b>	<b>Persentase Penataan Organisasi</b>																		
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	15	600.000.000,00	3	350.086.971,00	6	200.000.000,00	1	25.127.509,00	0	Dokumen	13.131.859,00	1	38.259.368,00	4	388.346.339,00	26,67	Dokumen	64,72
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	18	262.500.000,00	6	110.502.097,00	5	87.500.000,00	0		1	Laporan	5.186.200,00	1	5.186.200,00	7	115.688.297,00	38,89	Laporan	44,07
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	15	300.000.000,00	5	96.991.583,00	5	100.000.000,00	1	8.719.300,00	2	Dokumen	15.360.613,00	3	24.079.913,00	8	121.071.496,00	53,33	Dokumen	40,36
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	60	262.500.000,00	20	94.994.221,00	15	87.500.000,00	0		7	Dokumen	-	7	-	27	94.994.221,00	45,00	Dokumen	36,19
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	9	300.000.000,00	3	176.278.351,00	3	100.000.000,00	1	23.582.108,00	1	Dokumen	-	2	23.582.108,00	5	199.860.459,00	55,56	Dokumen	66,62
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Persentase terlaksananya kegiatan fasilitas keprotokolan dan komunikasi pimpinan</b>																		
	Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	117	1.057.050.000,00	43	306.758.044,00	32	307.050.000,00	12		0	laporan	11.825.864,00	12	11.825.864,00	55	318.583.908,00	47,01	Laporan	30,14
	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	82	393.000.000,00	29	368.631.408,00	20	93.000.000,00	2		0	laporan	-	2	-	31	368.631.408,00	37,80	Laporan	93,80
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	98	1.000.450.000,00	19	629.091.844,00	25	300.200.000,00	0		0	laporan	-	0	-	19	629.091.844,00	19,39	Laporan	62,88
	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Persentase Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>																		
	<b>Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Persentase terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan yang baik</b>																		
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	6	545.016.000,00	28	981.350.435,00	2	181.672.000,00	7	4.070.800,00	4	Dokumen	74.156.400,00	11	78.227.200,00	39	1.059.577.635,00	650,00	Dokumen	194,41

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 s/d Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung g Jawab	
			4	5	6	7	8	9		10		13 = 9 + 10 + 11 + 12	14 = 7 + 13	15 = (14/6) * 100					
								I	II										
1																		16	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	9	1.421.685.000,00	10	250.612.627,00	3	473.895.000,00	3	13.022.984,00		7.354.903,00	3	20.377.887,00	13	270.990.514,00	144,44	Dokumen	19,06
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	12	509.519.700,00	41	1.427.904.379,00	4	169.839.900,00	6	14.841.600,00	0	Dokumen 68.119.725,00	6	82.961.325,00	47	1.510.865.704,00	391,67	Dokumen	296,53
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pembinaan Kegiatan Keagamaan, Sosial dan Kemasyarakatan</b>																	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	21	6.731.550.000,00	12	6.081.661.913,00	7	2.243.850.000,00	2	313.381.096,00	2	Dokumen 3.015.433.459,00	4	3.328.814.555,00	16	9.410.476.468,00	76,19	Dokumen	139,80
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,	15	1.188.000.000,00	7	99.392.622,00	5	396.000.000,00	1	11.273.500,00	2	Dokumen 6.406.200,00	3	17.679.700,00	10	117.072.322,00	66,67	Dokumen	9,85
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsifan, Transhum Lintas,	9	270.000.000,00	6	1.388.757.970,00	3	90.000.000,00	0	7.450.200,00	1	Dokumen 14.842.100,00	1	22.292.300,00	7	1.411.050.270,00	77,78	Dokumen	522,61
	<b>Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Persentase Produk Hukum yang terfasilitasi</b>																	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1620	289.218.000,00	540	398.873.768,00	540	96.406.000,00	135	25.904.502,00	##	Dokumen 107.064.900,00	270	132.969.402,00	810	531.843.170,00	50,00	Dokumen	183,89
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	6	431.586.000,00	1	121.249.832,00	2	143.862.000,00		4.275.700,00	0	kasus -	0	4.275.700,00	1	125.525.532,00	16,67	Kasus	29,08
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1620	301.500.000,00	540	169.943.800,00	540	100.500.000,00	135	##	##	Dokumen 1.725.400,00	270	1.725.400,00	810	171.669.200,00	50,00	Dokumen	56,94
	<b>Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>																	
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen hasil fasilitas kerjasama dalam negeri	6	240.000.000,00	14	133.360.366,00	2	80.000.000,00	2	2.500.000,00	0	Dokumen 525.000,00	2	3.025.000,00	16	136.385.366,00	266,67	Dokumen	56,83
	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan</b>																	
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perekonomian</b>																	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3	270.000.000,00	1	90.332.867,00	1	90.000.000,00	0		1	Dokumen -	1	-	2	90.332.867,00	66,67	Dokumen	33,46
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	3	249.141.600,00	2	439.384.966,00	1	83.047.200,00	0	42.938.323,00	1	Laporan 7.824.200,00	1	50.762.523,00	3	490.147.489,00	100,00	Laporan	196,73
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	3	180.000.000,00	2	87.693.235,00	1	60.000.000,00	0	5.856.900,00	1	Dokumen	1	5.856.900,00	3	93.550.135,00	100,00	Dokumen	51,97
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	3	135.000.000,00	1	38.880.948,00	1	45.000.000,00	0		1	Dokumen 16.905.800,00	1	16.905.800,00	2	55.786.748,00	66,67	Dokumen	41,32
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Persentase Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi untuk Keseluruhan Pelaksanaan</b>																	
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	6	414.018.000,00	2	981.810.023,00	2	138.006.000,00	0	52.313.900,00	1	Dokumen 32.976.400,00	1	85.290.300,00	3	1.067.100.323,00	50,00	Dokumen	257,74
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12	1.166.314.400,00	4	441.006.173,00	4	422.104.800,00	0		0	Dokumen -	0	-	4	441.006.173,00	33,33	Laporan	37,81
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	6	4.863.352.000,00	2	470.378.148,00	2	2.287.784.000,00	1	17.143.528,00	0	Dokumen 27.887.891,00	1	45.031.419,00	3	515.409.567,00	50,00	Laporan	10,60
	<b>Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Persentase Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan</b>																	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3	513.894.576,00	2	225.944.150,00	1	171.298.192,00	0	28.814.600,00	1	Dokumen 38.702.200,00	1	67.516.800,00	3	293.460.950,00	100,00	Dokumen	57,11
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	3	915.723.648,00	5	232.471.700,00	1	305.241.216,00	1		1	Dokumen -	2	-	7	232.471.700,00	233,33	Dokumen	25,39
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	30	720.540.000,00	8	648.279.494,00	10	240.180.000,00	0	4.527.700,00	1	orang 4.070.800,00	1	8.598.500,00	9	656.877.994,00	30,00	Orang	91,16

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 s/d Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung Jawab			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	4	5	6		7		8		9				10		13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 7 + 13		15 = (14/6) * 100		16	
	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah kebijakan dibidang Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti daerah																				
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	3	240.000.000,00	1	270.984.752,00	1	80.000.000,00	1		0	Dokumen	7.725.400,00	1	7.725.400,00	2	278.710.152,00	66,67	Dokumen	116,13		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	3	150.000.000,00	1	143.807.219,00	1	50.000.000,00	1	8.713.900,00	0	Dokumen	3.450.800,00	1	12.164.700,00	2	155.971.919,00	66,67	Dokumen	103,98		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan	3	180.000.000,00	2	179.666.348,00	1	60.000.000,00	1	5.975.400,00	0	Dokumen	9.963.200,00	1	15.938.600,00	3	195.604.948,00	100,00	Dokumen	108,67		
			###	136.224.561.000,00	#####	49.204.307.631,58	1.900	43.990.377.000,00	###	3.493.019.620,00			12.579.345.049,00	#####	16.072.364.669,00	#####	65.276.672.300,58	4.788,38		5.268,42		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													56,37	36,54	55,48	47,92	81,16	89,30				
													Predikat Kinerja				Tinggi	Tinggi				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :-																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: Renstra dan Renja harus konsisten dengan RKA dan DPA																						

SEKRETARIS DAERAH



Drs. H. DJAINUDDIN NOOR, M.A.P  
Pembina Utama Madya I  
NIP. 19650821 199103 1

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan, sesuai dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, untuk penyusunan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis standar kebutuhan pelayanan sendiri dirumuskan indikator untuk mengukur kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.

Dengan rumusan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan diharapkan dapat dijadikan landasan dalam menjawab permasalahan yang dihadapi sehingga dapat diminimalisir. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kesenjangan berkaitan kondisi ideal organisasi Sekretariat Daerah yang diharapkan dengan kendala yang dinilai saat ini belum terpenuhi dapat diproyeksikan dengan kondisi-kondisi sebagai berikut :

1. Rumusan kebijakan yang difasilitasi penyusunannya oleh Sekretariat Daerah memenuhi kaidah prosedur dan mekanisme yang tepat serta mengandung aspek-aspek regulasi yang jelas, pasti dan adil serta dapat dilaksanakan melalui koordinasi yang sinergis antara unit-unit kerja pemerintah daerah secara efisien dan efektif.
2. Tersedianya kerangka gerak berupa pedoman yang terstandarisasi dalam rangka menunjang tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang bersifat regulasi (*regulation*), pelayanan (*service*) dan pemberdayaan (*empowering*) dengan ditunjang oleh pelayanan administrasi pemerintahan yang baik.

3. Pelaksanaan kewenangan, baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dilaksanakan secara efektif dengan adanya proses penataan organisasi pemerintahan yang lebih proporsional, efektif dan efisien sesuai kebutuhan secara obyektif
4. Kinerja aparatur pemerintah daerah mengarah pada profesionalitas diberbagai bidang yang terlihat dari peningkatan kemampuan teknis dan manajerial, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja akan lebih optimal dan berorientasi pada pencapaian tujuan.
5. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat secara esensial menunjang pada implementasi pelaksanaan otonomi daerah dengan membuka ruang partisipasi masyarakat yang dilandasi oleh budaya budaya kerja yang tinggi.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, yaitu permasalahan pada Tataran Kebijakan, Program Kegiatan dan kebutuhan teknis operasional. Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya layanan fasilitasi dan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
2. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik;
3. Belum optimalnya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah;
4. Masih rendahnya fungsi pengawasan, dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah;
5. Belum optimalnya kebijakan penanganan permasalahan pembangunan, perekonomian daerah dan kesejahteraan sosial dan masyarakat.

Pada tingkat implementasi Program dan Kegiatan pada Bagian/Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya capaian kinerja pemerintah daerah;
2. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
3. Kurangnya motivasi kerja aparatur dalam penyusunan program dan kegiatan yang berbasis kinerja;
4. Kurangnya fungsi pengawasan dan pengendalian internal dalam pelaksanaan program/kegiatan;
5. Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan belum optimal;
6. Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

1. Kuantitas dan kualitas SDM pada sebagian/unit kerja masih kurang;
2. Kurangnya komitmen aparatur dalam mewujudkan capaian kinerja organisasi
3. Kurang memadainya sarana kerja terutama akses jaringan internet yang belum sepenuhnya dapat memberikan kemudahan dan keamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur

Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan melaksanakan berbagai tugas dan fungsi guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan. Adapun terdapat permasalahan-permasalahan atau kendala pada pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan yang sangat berpengaruh pada pencapaian keberhasilan pembangunan Sekretariat Daerah, ialah sebagai berikut.

1. Belum optimalnya capaian kinerja pemerintah daerah;
2. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
3. Kurangnya motivasi kerja aparatur dalam penyusunan program dan kegiatan yang berbasis kinerja;
4. Kurangnya fungsi pengawasan dan pengendalian internal dalam pelaksanaan program/kegiatan;
5. Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan belum optimal;
6. Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan.

Berdasarkan pada permasalahan diatas maka sangat diperlukan analisa isu-isu strategis karena merupakan hal yang sangat penting dan juga sangat membantu dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah. Isu Strategis menggambarkan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa yang akan datang dan apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya ada beberapa isu-isu strategis yang perlu diperhatikan agar lebih terarah dan berkelanjutan ialah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas penataan organisasi dan tata kelola Perangkat Daerah. Kualitas penataan organisasi dan tata kelola Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan masih belum optimal. Ketidakefektifan tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan yang masih belum berjalan secara terencana, komprehensif, sistematis dan berkelanjutan pada seluruh area manajemen perubahan. Beberapa indikator yang mencerminkan ketidakefektifan tersebut juga dapat dilihat dari Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Seruyan masih dengan predikat nilai CC, dan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah masih dibawah target. Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melakukan perubahan dan pembaharuan mendasar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek organisasi, kelembagaan, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan publik, pengawasan dan sumber daya aparatur;
2. Belum optimalnya pembinaan, dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian, dan pembangunan. Sekretariat Daerah dalam menjalankan fungsi sebagai lini koordinasi, menyusun kebijakan, serta memantau dan mengevaluasi kebijakan daerah masih belum berjalan secara optimal. Adapun hal-hal yang melatarbelakangi Sekretariat Daerah perlu mengoptimalkan pembinaan, dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di bidang pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah
  - Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan raport Pemerintah Kabupaten Seruyan yang dinilai oleh pemerintah pusat yang seyogyanya merupakan gambaran capaian kinerja semua pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten. Adanya perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dan mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi daerah melalui Dana Insentif Daerah (DID) dimana salah satu

indikator penilaiannya adalah hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah memenuhi passing grade B.

- Belum optimalnya penataan wilayah karena masih ada segmen batas yang belum selesai dan adanya moratorium daerah otonomi baru
- Penataan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan tidak tumpang tindih dengan aturan yang setara atau lebih tinggi
- Belum optimalnya fasilitasi dalam rangka pembinaan mental dan spiritual, pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat sesuai urusan yang menjadi kendali Sekretariat Daerah.

Isu lainnya yang berkenaan dengan perlunya optimalisasi pembinaan, dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di bidang perekonomian dan pembangunan, dilatarbelakangi oleh :

- Perlu adanya implementasi program kerja dalam Roadmap Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Seruyan yang dijalankan secara konsisten dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
- Peran dan skala usaha BUMD yang perlu diarahkan dalam rangka mendorong pembangunan di Kabupaten Seruyan, memiliki daya saing, efisien, dan produktif sehingga memberikan kontribusi secara signifikan terhadap PAD, penyerapan tenaga kerja, serta mendorong aktivitas perekonomian daerah.
- Perlunya penguatan peran pengadministrasian pembangunan Kabupaten Seruyan
- Perlunya mendorong terwujudnya tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Seruyan sesuai standar nasional. Tingkat kematangan UKPBJ merupakan gambaran tentang tingkat kematangan proses pelaksanaan aktivitas dalam organisasi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan proses produksi.

Berangkat dari berbagai permasalahan dan Isu Strategis terkait Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah maka dapat dilihat melalui tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah  
Kabupaten Seruyan

Topuksi	Isu Strategis
<p><b>Tugas Pokok :</b> Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.</p>	<p>1. Belum optimalnya kualitas penataan organisasi dan tata kelola Perangkat Daerah. Kualitas penataan organisasi dan tata kelola Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan masih belum optimal. Ketidakefektifan tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan yang masih belum berjalan secara terencana, komprehensif, sistematis dan berkelanjutan pada seluruh area manajemen perubahan. Beberapa indikator yang mencerminkan ketidakefektifan tersebut juga dapat dilihat dari Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Seruyan masih dengan predikat nilai CC, dan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah masih dibawah target. Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melakukan perubahan dan pembaharuan mendasar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek organisasi, kelembagaan, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan publik, pengawasan dan sumber daya aparatur</p>
<p><b>Fungsi</b></p>	
1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah	
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah	
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah	
4. Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi daerah;	
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas fungsinya	<p>2. Belum optimalnya pembinaan, dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian, dan pembangunan. Sekretariat Daerah dalam menjalankan fungsi sebagai lini koordinasi, menyusun kebijakan, serta memantau dan mengevaluasi kebijakan daerah masih belum berjalan secara optimal. Adapun hal-hal yang melatarbelakangi Sekretariat Daerah perlu mengoptimalkan pembinaan, dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di bidang pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan raport Pemerintah Kabupaten Seruyan yang dinilai oleh pemerintah pusat yang seyogyanya merupakan gambaran capaian kinerja semua pelaksanaan urusan pemerintahan</li> </ul>

	<p>kabupaten. Adanya perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dan mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi daerah melalui Dana Insentif Daerah (DID) dimana salah satu indikator penilaiannya adalah hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah memenuhi passing grade B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya penataan wilayah karena masih ada segmen batas yang belum selesai dan adanya moratorium daerah otonomi baru</li> <li>- Penataan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan tidak tumpang tindih dengan aturan yang setara atau lebih tinggi</li> <li>- Belum optimalnya fasilitasi dalam rangka pembinaan mental dan spiritual, pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat sesuai urusan yang menjadi kendali Sekretariat Daerah.</li> </ul> <p>Isu lainnya yang berkenaan dengan perlunya optimalisasi pembinaan, dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di bidang perekonomian dan pembangunan, dilatarbelakangi oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu adanya implementasi program kerja dalam Roadmap Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Seruyan yang dijalankan secara konsisten dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.</li> <li>- Peran dan skala usaha BUMD yang perlu diarahkan dalam rangka mendorong pembangunan di Kabupaten Seruyan, memiliki daya saing, efisien, dan produktif sehingga memberikan kontribusi secara signifikan terhadap PAD, penyerapan tenaga kerja, serta mendorong aktivitas perekonomian daerah</li> <li>- Perlunya penguatan peran pengadministrasian pembangunan Kabupaten Seruyan</li> <li>- Perlunya mendorong terwujudnya tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Seruyan sesuai standar nasional. Tingkat kematangan UKPBJ merupakan gambaran tentang tingkat kematangan proses pelaksanaan aktivitas dalam organisasi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan proses produksi</li> </ul>
--	--

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini tidak terlepas dari dokumen RKPD yang telah diusulkan sebelumnya, Program dan Kegiatan yang diusulkan dalam rancangan Renja ini seluruhnya telah sesuai serta mengikuti program/kegiatan yang telah diusulkan dalam dokumen RKPD sebelumnya. Semua kebutuhan untuk pelaksanaan Renja Tahun 2026 telah ditampung semuanya dalam RKPD, oleh karena itu, tidak dijelaskan lebih dalam mengenai perubahan rancangan program dan kegiatan baik penambahan maupun penghapusan. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
Kode Rek		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
(1)		(2)		(3)	(7)	(8)							
						<b>47.152.002.000,00</b>					<b>47.152.002.000,00</b>		
						<b>41.243.315.692,00</b>					<b>41.243.315.692,00</b>		
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>01</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kab. Seruyan	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100%	32.744.718.262,00	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kab. Seruyan	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100%	32.744.718.262,00
					Kab. Seruyan	Persentase PD yang menyelesaikan laporan kinerja yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100.000.000,00		Kab. Seruyan	Persentase PD yang menyelesaikan laporan kinerja yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100.000.000,00
					Kab. Seruyan	Persentase PD yang menyusun SOP dan Probes	100%	87.500.000,00		Kab. Seruyan	Persentase PD yang menyusun SOP dan Probes	100%	87.500.000,00
					Kab. Seruyan	Persentase PD yang menyusun Standart pelayanan Publik serta melaksanakan survey kepuasan masyarakat	100%	87.500.000,00		Kab. Seruyan	Persentase PD yang menyusun Standart pelayanan Publik serta melaksanakan survey kepuasan masyarakat	100%	87.500.000,00

						Kab. Seruyan	Persentase PD yang menjalankan dan memiliki kelompok budaya kerja	100%	100.000.000,00		Kab. Seruyan	Persentase PD yang menjalankan dan memiliki kelompok budaya kerja	100%	100.000.000,00
						Kab. Seruyan	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terlayani dengan baik	100%	3.543.106.954,00		Kab. Seruyan	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terlayani dengan baik	100%	3.543.106.954,00
						Kab. Seruyan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	4.380.490.476,00		Kab. Seruyan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	4.380.490.476,00
						Kab. Seruyan	Persentase persetujuan evajab Kementerian PANRB yang ditindaklanjuti menjadi Perbub Kelas jabatan	100%	100.000.000,00		Kab. Seruyan	Persentase persetujuan evajab Kementerian PANRB yang ditindaklanjuti menjadi Perbub Kelas jabatan	100%	100.000.000,00
						Kab. Seruyan	Persentase usulan perubahan Perbup SOTK yang ditindaklanjuti	100%	100.000.000,00		Kab. Seruyan	Persentase usulan perubahan Perbup SOTK yang ditindaklanjuti	100%	100.000.000,00
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kab. Seruyan	<b>Persentase Dokumen, Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun</b>	<b>100%</b>	<b>150.822.500,00</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kab. Seruyan	<b>Persentase Dokumen, Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun</b>	<b>100%</b>	<b>150.822.500,00</b>
01	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	71.402.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	71.402.000

01	02	01	2.0 1	00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.206.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.206.500
01	02	01	2.0 1	00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.059.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.059.000
01	02	01	2.0 1	00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.505.500	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.505.500
01	02	01	2.0 1	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.505.500	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.505.500
01	02	01	2.0 1	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	40.092.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	40.092.000

01	02	01	2.0 1	00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.052.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.052.000
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.0 2</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kab. Seruyan	<b>Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>23.495.480.762,00</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kab. Seruyan	<b>Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>23.495.480.762,00</b>
01	02	01	2.0 2	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Seruyan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	135 Orang/bln	23.495.480.762,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Seruyan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	135 Orang/bln	23.495.480.762,00
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.0 3</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Kab. Seruyan	<b>Tersedianya laporan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>36 Lapoan</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Kab. Seruyan	<b>Tersedianya laporan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>36 Lapoan</b>	<b>95.000.000,00</b>
01	02	01	2.0 3	00 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 Laporan	95.000.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 Laporan	95.000.000,00
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.0 5</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kab. Seruyan	<b>Persentase pegawai yang memperoleh pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kab. Seruyan	<b>Persentase pegawai yang memperoleh pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>180.000.000,00</b>
01	02	01	2.0 5	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Seruyan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	150.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Seruyan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	150.000.000,00
01	02	01	2.0 5	00 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Seruyan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	15 Orang	30.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Seruyan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	15 Orang	30.000.000,00

							Perundang-Undangan					Perundang-Undangan		
01	02	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kab. Seruyan	<b>Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.300.000.000,00</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kab. Seruyan	<b>Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.300.000.000,00</b>
01	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Seruyan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Paket	150.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Seruyan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Paket	150.000.000,00
01	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Seruyan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	150.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Seruyan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	150.000.000,00
01	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Seruyan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	100.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Seruyan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	100.000.000,00
01	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Seruyan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	50.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Seruyan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	50.000.000,00
01	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	850.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	850.000.000,00
01	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	1.000.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	1.000.000.000,00

01	02	01	2.0 7		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kab. Seruyan	<b>Tersedianya Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2 Unit</b>	<b>2.250.000.000,00</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kab. Seruyan	<b>Tersedianya Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2 Unit</b>	<b>2.250.000.000,00</b>
01	02	01	2.0 7	00 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Seruyan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	1.200.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Seruyan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	1.200.000.000,00
01	02	01	2.0 7	00 02	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Seruyan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	850.000.000,00	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Seruyan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	850.000.000,00
01	02	01	2.0 7	00 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Seruyan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Seruyan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000,00
01	02	01	2.0 8		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Seruyan	<b>Persentase terpenuhinya pelayananan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>6.618.415.000,00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Seruyan	<b>Persentase terpenuhinya pelayananan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>6.618.415.000,00</b>
01	02	01	2.0 8	00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	26.400.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	26.400.000,00
01	02	01	2.0 8	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.100.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.100.000.000,00

01	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000,00
01	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.442.015.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.442.015.000,00
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Seruyan	<b>Persentase terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai dengan RKPBM Perangkat Daerah</b>		<b>2.035.490.476,00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Seruyan	<b>Persentase terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai dengan RKPBM Perangkat Daerah</b>		<b>2.035.490.476,00</b>
01	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Seruyan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	938.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Seruyan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	938.000.000,00
01	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Seruyan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit	800.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Seruyan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit	800.000.000,00
01	02	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Seruyan	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	90.000.000,00	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Seruyan	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	90.000.000,00

01	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Seruyan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Seruyan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-
01	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kab. Seruyan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kab. Seruyan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-
01	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Seruyan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	207.490.476,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Seruyan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	207.490.476,00
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.11</b>		<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	Kab. Seruyan	<b>Persentase Terlaksananya pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.143.106.954,00</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	Kab. Seruyan	<b>Persentase Terlaksananya pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.143.106.954,00</b>
01	02	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Seruyan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	593.106.954,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Seruyan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	593.106.954,00
01	02	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Seruyan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	150.000.000,00	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Seruyan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	150.000.000,00

01	02	01	2.1 1	00 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Seruyan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	400.000.000,00	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Seruyan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	400.000.000,00
01	02	01	2.1 2		<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	Kab. Seruyan	<b>Jumlah paket fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang disediakan</b>	<b>24 Paket</b>	<b>1.450.000.000,00</b>	<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	Kab. Seruyan	<b>Jumlah paket fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang disediakan</b>	<b>24 Paket</b>	<b>1.450.000.000,00</b>
01	02	01	2.1 2	00 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab. Seruyan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	800.000.000,00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab. Seruyan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	800.000.000,00
01	02	01	2.1 2	00 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Seruyan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	650.000.000,00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Seruyan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	650.000.000,00
									<b>575.000.000</b>					<b>575.000.000</b>
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.1 3</b>		<b>Penataan Organisasi</b>	Kab. Seruyan	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam penyusunan laporan kinerja dan Penyusunan Dokumen SAKIP	41 PD	50.000.000,00	<b>Penataan Organisasi</b>	Kab. Seruyan	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam penyusunan laporan kinerja dan Penyusunan Dokumen SAKIP	41 PD	50.000.000,00
						Kab. Seruyan	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi penyusunan perjanjian kinerja	41 PD	50.000.000,00		Kab. Seruyan	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi penyusunan perjanjian kinerja	41 PD	50.000.000,00
						Kab. Seruyan	Persentase PD yang telah menarapkan Core Values ASN BerAKHAL	100%	100.000.000,00		Kab. Seruyan	Persentase PD yang telah menarapkan Core Values ASN BerAKHAL	100%	100.000.000,00

						Kab. Seruyan	Jumlah unit pelayanan publik yang melaksanakan survey kepuasan masyarakat	25 PD	30.000.000,00		Kab. Seruyan	Jumlah unit pelayanan publik yang melaksanakan survey kepuasan masyarakat	25 PD	30.000.000,00
						Kab. Seruyan	Persentase perangkat daerah yang menyusun SPP	100%	30.000.000,00		Kab. Seruyan	Persentase perangkat daerah yang menyusun SPP	100%	30.000.000,00
						Kab. Seruyan	Jumlah inovasi pelayanan publik yang mengikuti kompetisi	8 PD	27.500.000,00		Kab. Seruyan	Jumlah inovasi pelayanan publik yang mengikuti kompetisi	8 PD	27.500.000,00
						Kab. Seruyan	Persentase PD yang menyusun SOP dan Probes	100%	87.500.000,00		Kab. Seruyan	Persentase PD yang menyusun SOP dan Probes	100%	87.500.000,00
						Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 Dokumen	200.000.000,00		Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 Dokumen	200.000.000,00
01	02	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 Dokumen	200.000.000,00	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 Dokumen	200.000.000,00
01	02	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	7 Laporan	87.500.000,00	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	7 Laporan	87.500.000,00
01	02	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Dokumen	100.000.000,00	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Dokumen	100.000.000,00
01	02	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	25 Dokumen	87.500.000,00	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	25 Dokumen	87.500.000,00

01	02	01	2.1 3	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Dokumen	100.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Dokumen	100.000.000,00
01	02	01	2.1 4		<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	Kab. Seruyan	<b>Persentase terlaksananya kegiatan fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan</b>	<b>100%</b>	<b>950.000.000</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	Kab. Seruyan	<b>Persentase terlaksananya kegiatan fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan</b>	<b>100%</b>	<b>950.000.000</b>
01	02	01	2.1 4	00 01	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	45 laporan	405.000.000	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	45 laporan	405.000.000
01	02	01	2.1 4	00 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	32 laporan	170.000.000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	32 laporan	170.000.000
01	02	01	2.1 4	00 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	38 laporan	375.000.000	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	38 laporan	375.000.000
									<b>3.976.024.900,00</b>					<b>3.976.024.900,00</b>
4	01	02			<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Kab. Seruyan	Persentase Produk Hukum yang terfasilitasi	100%	340.768.000,00	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Kab. Seruyan	Persentase Produk Hukum yang terfasilitasi	100%	340.768.000,00
						Kab. Seruyan	Jumlah kebijakan dan laporan tata kelola pemerintahan yang ditindaklanjuti	9 Laporan	825.406.900,00		Kab. Seruyan	Jumlah kebijakan dan laporan tata kelola pemerintahan yang ditindaklanjuti	9 Laporan	825.406.900,00
						Kab. Seruyan	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	100%	2.729.850.000,00		Kab. Seruyan	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	100%	2.729.850.000,00
						Kab. Seruyan	Persentase fasilitasi kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	100%	80.000.000,00		Kab. Seruyan	Persentase fasilitasi kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	100%	80.000.000,00

4	01	02	2.0 1		<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	Kab. Seruyan	<b>Persentase terlaksananya Adminstrasi Tata Pemerintahan yang baik</b>	100%	<b>825.406.900,00</b>	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	Kab. Seruyan	<b>Persentase terlaksananya Adminstrasi Tata Pemerintahan yang baik</b>	100%	<b>825.406.900,00</b>
4	01	02	2.0 1	00 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	181.672.000,00	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	181.672.000,00
4	01	02	2.0 1	00 01 2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	473.895.000,00	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	473.895.000,00
4	01	02	2.0 1	00 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	169.839.900,00	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	169.839.900,00
4	01	02	2.0 2		<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	Kab. Seruyan	<b>Persentase Terlaksananya Pembinaan Kegiatan Keagamaan, Sosial dan Kemasyarakatan</b>	100%	<b>2.729.850.000</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	Kab. Seruyan	<b>Persentase Terlaksananya Pembinaan Kegiatan Keagamaan, Sosial dan Kemasyarakatan</b>	100%	<b>2.729.850.000</b>
4	01	02	2.0 2	00 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7 Dokumen	2.243.850.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7 Dokumen	2.243.850.000
4	01	02	2.0 2	00 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,	5 Dokumen	396.000.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi	5 Dokumen	396.000.000

						Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB					Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3 Dokumen	90.000.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3 Dokumen	90.000.000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>		<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	Kab. Seruyan	<b>Persentase Produk Hukum yang terfasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>340.768.000,00</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	Kab. Seruyan	<b>Persentase Produk Hukum yang terfasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>340.768.000,00</b>
						Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	13 Laporan			Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	13 Laporan	
						Kab. Seruyan	Jumlah Peraturan Daerah yang dilakukan fasilitasi pembentukannya	12 Perda			Kab. Seruyan	Jumlah Peraturan Daerah yang dilakukan fasilitasi pembentukannya	12 Perda	
						Kab. Seruyan	Jumlah Peraturan Bupati yang Dilakukan Harmonisasi Dalam Pembentukannya	36 Perbub			Kab. Seruyan	Jumlah Peraturan Bupati yang Dilakukan Harmonisasi Dalam Pembentukannya	36 Perbub	
						Kab. Seruyan	Jumlah Keputusan Bupati yang Dilakukan Harmonisasi Dalam Pembentukannya	540 SK			Kab. Seruyan	Jumlah Keputusan Bupati yang Dilakukan Harmonisasi	540 SK	

											Dalam Pembentukannya			
						Kab. Seruyan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang Dipublikasikan Pada OPD	540 Produk Hukum			Kab. Seruyan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang Dipublikasikan Pada OPD	540 Produk Hukum	
						Kab. Seruyan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disosialisasikan Kepada Masyarakat	2 Produk Hukum			Kab. Seruyan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disosialisasikan Kepada Masyarakat	2 Produk Hukum	
						Kab. Seruyan	Jumlah Kasus yang dilakukan pendampingan bantuan hukum	2 Kasus			Kab. Seruyan	Jumlah Kasus yang dilakukan pendampingan bantuan hukum	2 Kasus	
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Seruyan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	540 Dokumen	96.406.000,00	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Seruyan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	540 Dokumen	96.406.000,00
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Seruyan	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Kasus	143.862.000,00	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Seruyan	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Kasus	143.862.000,00
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Seruyan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	540 Dokumen	100.500.000,00	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Seruyan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	540 Dokumen	100.500.000,00
4	01	02	2.04		<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	Kab. Seruyan	<b>Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	Kab. Seruyan	<b>Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>80.000.000,00</b>
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	2 Dokumen	80.000.000,00	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	2 Dokumen	80.000.000,00

									1.932.661.408,00					1.932.661.408,00
4	01	03			<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Kab. Seruyan	Persentase Koordinasi pengembangan, pengawasan, dan pengendalian di bidang Perekonomian	100%	278.047.200,00	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>		Persentase Koordinasi pengembangan, pengawasan, dan pengendalian di bidang Perekonomian	100%	278.047.200,00
						Kab. Seruyan	Persentase keselarasan kebijakan dibidang Sumber Daya Alam yang di tindaklanjuti Daerah	100%	190.000.000,00		Kab. Seruyan	Persentase keselarasan kebijakan dibidang Sumber Daya Alam yang di tindaklanjuti Daerah	100%	190.000.000,00
						Kab. Seruyan	Persentase jumlah OPD yang menyampaikan Laporan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	100%	747.894.800,00		Kab. Seruyan	Persentase jumlah OPD yang menyampaikan Laporan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	100%	747.894.800,00
						Kab. Seruyan	Persentase Paket yang terselesaikan	100%	716.719.408,00		Kab. Seruyan	Persentase Paket yang terselesaikan	100%	716.719.408,00
									<b>278.047.200,00</b>					<b>278.047.200,00</b>
4	01	03	2.0 1		<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	Kab. Seruyan	Persentase Rekomendasi Kebijakan-Kebijakan Pengendalian Perekonomian yang di tindaklanjuti	100%	83.047.200,00	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	Kab. Seruyan	Persentase Rekomendasi Kebijakan-Kebijakan Pengendalian Perekonomian yang di tindaklanjuti	100%	83.047.200,00
						Kab. Seruyan	Persentase penyelesaian koordinasi pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi PD/Unit	100%	135.000.000,00		Kab. Seruyan	Persentase penyelesaian koordinasi pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi PD/Unit	100%	135.000.000,00

							kerja lingkup bidang perekonomian							
						Kab. Seruyan	Persentase pencapaian sasaran strategis Pemkab. Seruyan dalam lingkup bidang perekonomian sesuai dengan target yang telah ditetapkan	100%	60.000.000,00		Kab. Seruyan	Persentase pencapaian sasaran strategis Pemkab. Seruyan dalam lingkup bidang perekonomian sesuai dengan target yang telah ditetapkan	100%	60.000.000,00
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	90.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	90.000.000,00
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	83.047.200,00	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	83.047.200,00
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	60.000.000,00	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	60.000.000,00
4	01	03	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1 Dokumen	45.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1 Dokumen	45.000.000,00

4	01	03	2.0 1	00 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	-	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	-	-
4	01	03	2.0 2		<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	Kab. Seruyan	<b>Persentase Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi untuk Keselarasan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>747.894.800,00</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	Kab. Seruyan	<b>Persentase Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi untuk Keselarasan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>747.894.800,00</b>
4	01	03	2.0 2	00 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokum en	138.006.000,00	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokum en	138.006.000,00
4	01	03	2.0 2	00 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	322.104.800,00	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Lapora n	322.104.800,00
4	01	03	2.0 2	00 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	287.784.000,00	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Lapora n	287.784.000,00
4	01	03	2.0 3		<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	Kab. Seruyan	<b>Persentase Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan</b>	<b>100%</b>	<b>716.719.408,00</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	Kab. Seruyan	<b>Persentase Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan</b>	<b>100%</b>	<b>716.719.408,00</b>
4	01	03	2.0 3	00 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokum en	171.298.192,00	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokum en	171.298.192,00

4	01	03	2.0 3	00 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	305.241.216,00	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	305.241.216,00
4	01	03	2.0 3	00 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Seruyan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	10 Orang	240.180.000,00	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Seruyan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	10 Orang	240.180.000,00
4	01	03	2.0 4		<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	Kab. Seruyan	<b>Jumlah kebijakan dibidang Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti daerah</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>190.000.000,00</b>	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	Kab. Seruyan	<b>Jumlah kebijakan dibidang Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti daerah</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>190.000.000,00</b>
4	01	03	2.0 4	00 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	80.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	80.000.000,00
4	01	03	2.0 4	00 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	50.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	50.000.000,00

4	01	03	2.0 4	00 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	60.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	60.000.000,00
---	----	----	----------	----------	--	-----------------	---	--------------	---------------	--	-----------------	--	--------------	---------------

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Penelaah kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN merupakan salah satu identifikasi faktor-faktor eksternal yang bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan pemerintah terpenting, yang berhubungan, dan berpengaruh langsung terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan. Hasil telaahan pada dasarnya dimaksud sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau, sebaliknya, ancaman bagi daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, telah disebutkan bahwa kebijakan perencanaan pembangunan diprioritaskan pada mewujudkan proses perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas baik jangka menengah maupun tahunan. Dengan peningkatan kualitas proses perencanaan tersebut, maka diharapkan rencana pembangunan yang dihasilkan lebih baik atau lebih berkualitas dalam arti lebih jelas dan terukur dari tahun ke tahun, terdapat keterpaduan dan sinkronisasi yang lebih baik antar bidang, dan antara rencana pusat dengan rencana daerah.

Sehubungan dengan hal dimaksud, arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan fasilitasi, konsultasi dan evaluasi di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengembangan kinerja
2. Penyempurnaan regulasi dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja melalui program reformasi birokrasi
3. Penyusunan peta proses bisnis seluruh Perangkat Daerah
4. Penyusunan/ penyempurnaan Peta Jabatan, serta Analisis Jabatan dan Beban Kerja
5. Merumuskan kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja, pelaksanaan Reformasi Birokrasi, penatalaksanaan, dan pelayanan

publik

6. Peningkatan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah
7. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan dalam rangka penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
8. Peningkatan Citra Positif KDH/WKDH
9. Peningkatan Capaian Indikator SPM
10. Peningkatan Capaian Indikator IKM
11. Peningkatan Manajemen Aset Sekretariat Daerah
12. Menjalin Koordinasi dan Fasilitasi yang Insentif dan Berkesinambungan terkait Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
13. Menyusun rumusan kebijakan dalam rangka penataan kewilayahan
14. Melaksanakan fasilitasi kerjasama pemerintah daerah
15. Percepatan Implementasi Kerjasama Daerah
16. Mewujudkan Sinergitas Produk Hukum Daerah dengan perundang-undangan lainnya
17. Melakukan penataan Peraturan Perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan publikasi produk hukum daerah
18. Mewujudkan kualitas layanan Kebijakan sosial kemasyarakatan
19. Melaksanakan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat
20. Penguatan koordinasi antar Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan pengendalian inflasi daerah
21. Peningkatan Kegiatan Perekonomian Daerah melalui Optimalisasi BLUD dan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan UMKM
22. Penguatan sistem koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan urusan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, pertambangan dan lingkungan hidup, serta energi dan air
23. Peningkatan Sistem Pengawasan Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah

24. Meningkatkan kualitas data dan informasi dalam rangka fasilitasi penyusunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan
25. Penerapan Sistem Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Seleksi/Tender
26. Peningkatan kualitas perumusan strategi pengelolaan barang dan jasa dengan cara pemenuhan komponen variabel penilaian kematangan unit kerja pengadaan barang dan jasa
27. Pembinaan pengelola pengadaan barang dan jasa melalui pembinaan pola karir jabatan fungsional, pemetaan pengembangan SDM PPBJ serta mengadakan bimbingan teknis dan advokasi pengadaan barang dan jasa
28. Peningkatan Kapasitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah**

Dalam rangka mempermudah dalam memahami Rencana Kerja berikut ini akan dirumuskan mulai dari visi sampai dengan sasaran.

3.2.1. Visi Kepala Daerah Kabupaten Seruyan 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

**“Terwujudnya Transformasi Pembangunan Kabupaten Seruyan yang Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju, dan Amanah untuk Semua”**

3.2.2. Pencapaian Visi akan diwujudkan dalam Misi Pancacita Kebangkitan Seruyan melalui Perubahan Berkelanjutan di Kabupaten Seruyan 2025-2029, yaitu:

1. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul
2. Mewujudkan Iklim kehidupan yang Berbudaya, Demokratis, Agamis, Bermoral, Tertib, dan Inklusif.
3. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa dan Inovasi Layanan Publik.
4. Mewujudkan Harmonisasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana.

5. Mewujudkan Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Investasi Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Unggulan Daerah

3.2.3. Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan yang tertuang di dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 yaitu :  
 “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien”

3.2.4 Sasaran terdiri sebagai berikut yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Lingkup Sekretariat Daerah
3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Adapun penjabaran tujuan dan sasaran dengan indikator kinerja tujuan dan sasaran serta targetnya pada tahun 2026 sebagaimana tabel 3.2 tersaji berikut ini :

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		Nilai SAKIP Setda	Nilai	B(61,00)
		Nilai EPPD	Nilai	Tinggi (2,9890)
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan Umum	Persen	100
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik lingkup setda	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setda	Nilai	B (80,00)
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100
		Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persen	100

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program Sekretariat Daerah merupakan program prioritas RKPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RKPD, selanjutnya dijabarkan Sekretariat Daerah kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Sekretariat Daerah. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Adapun jumlah Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026 adalah sebanyak 3 (tiga) Program, 20 (dua puluh) Kegiatan dan 66 (enam puluh enam) Sub Kegiatan, yang dibiayai oleh dana APBD Kabupaten Seruyan sebesar **Rp.39.018.414.494,00**. (Tiga Puluh Sembilan Milyar Delapan Belas Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Empat Puluh Sembilan Empat Rupiah). Adapun rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. SERUYAN  
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>39.018.414.494,00</b>							<b>37.494.169.623,00</b>	
	<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>39.018.414.494,00</b>							<b>37.494.169.623,00</b>	
	<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>39.018.414.494,00</b>							<b>37.494.169.623,00</b>	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Indeks Kematangan Organisasi</i>	-			4 Score	33.958.348.494,00						-	32.434.103.623,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen, Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun</i>	-			100 %	126.200.000,00			-	-	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pegawai	-	126.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				4 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pegawai		60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	13.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pegawai		13.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pegawai		6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pegawai		4.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pegawai		4.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				4 Laporan	34.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pegawai		34.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				4 Laporan	4.200.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pegawai		4.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan</i>	-			100 %	20.063.000.000,00			-	-	Pemerintah Daerah, Masyarakat, Pegawai	-	18.538.755.129,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				135 Orang/bulan	20.000.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Masyarakat, Pegawai		18.475.755.129,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				25 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Masyarakat, Pegawai		45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Masyarakat, Pegawai		10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				24 Laporan	8.000.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Masyarakat, Pegawai		8.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Tersedianya laporan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	-			36 laporan	80.000.000,00			-	-	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pegawai	-	80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				36 Laporan	80.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pegawai		80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	-			5 Dokumen	2.000.000,00			-	-	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pegawai	-	2.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				5 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pegawai		2.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang memperoleh pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 %	154.000.000,00			-	-	Pemerintah Daerah, Pegawai	-	154.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	130.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Pegawai		130.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	24.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Pegawai		24.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	1.932.800.000,00			-	-	Pemerintah Daerah, Pegawai, Kelompok Masyarakat	-	1.932.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				36 Paket	129.600.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Pegawai, Kelompok Masyarakat		129.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	129.600.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Pegawai, Kelompok Masyarakat		129.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	2.000.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Pegawai, Kelompok Masyarakat		2.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	86.400.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Pegawai, Kelompok Masyarakat		86.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				25 Paket	43.200.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Pegawai, Kelompok Masyarakat		43.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				10 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Pegawai, Kelompok Masyarakat		2.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				10 Paket	2.000.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Pegawai, Kelompok Masyarakat		2.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	674.000.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Pegawai, Kelompok Masyarakat		674.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				100 Laporan	864.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Pegawai, Kelompok Masyarakat		864.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Tersedianya Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			82 unit	1.654.940.680,00			-	-	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pegawai, KDH dan WKDH	-	1.654.940.680,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				2 Unit	750.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pegawai, KDH dan WKDH		750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				2 Unit	718.140.680,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pegawai, KDH dan WKDH		718.140.680,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														
			<i>Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan</i>				5 Unit	2.000.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pegawai, KDH dan WKDH		2.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				5 Unit	2.000.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pegawai, KDH dan WKDH		2.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	2.000.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pegawai, KDH dan WKDH		2.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	2.000.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pegawai, KDH dan WKDH		2.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			<i>Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan</i>				2 Unit	2.000.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pegawai, KDH dan WKDH		2.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	2.000.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pegawai, KDH dan WKDH		2.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	2.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pegawai, KDH dan WKDH		2.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	172.800.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pegawai, KDH dan WKDH		172.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase terpenuhinya pelayananan penunjang urusan pemerintah daerah</i>	-			90 %	5.485.200.860,00			-	-	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pegawai	-	5.485.200.860,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	22.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pegawai		22.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	720.000.860,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pegawai		720.000.860,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	43.200.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pegawai		43.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	4.700.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pegawai		4.700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai dengan RKPMD Perangkat Daerah</i>	-			90 %	1.327.000.000,00			-	-	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pegawai	-	1.327.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				30 Unit	500.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pegawai		500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				43 Unit	600.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pegawai		600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			<i>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara</i>				100 Unit	50.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pegawai		50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				12 Unit	175.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pegawai		175.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah														
			<i>Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi</i>				5 Ha	2.000.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pegawai		2.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	<i>Persentase Terlaksananya pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	-			90 %	1.070.106.954,00			-	-	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, KDH dan WKDH	-	1.070.106.954,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				2 Orang/Bulan	593.106.954,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, KDH dan WKDH		593.106.954,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>				2 Paket	75.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, KDH dan WKDH		75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				2 Orang	2.000.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, KDH dan WKDH		2.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				2 Orang/Bulan	400.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, KDH dan WKDH		400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	<i>Jumlah paket fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang disediakan</i>	-			24 paket	1.252.800.000,00			-	-	Pemerintah Daerah, KDH dan WKDH, Pegawai	-	1.252.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</i>				12 Paket	691.200.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, KDH dan WKDH, Pegawai		691.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>				12 Paket	561.600.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, KDH dan WKDH, Pegawai		561.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Probes Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang di bentuk Persentase Penataan Jabatan Perangkat Daerah</i>	-			41 PD 100 % 100 %	547.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, memperkuat pencegahan dan pemb erantasan korupsi	Pemerintah Daerah, Pegawai, Masyarakat	-	547.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</i>				6 Dokumen	172.800.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, memperkuat pencegahan dan pemb erantasan korupsi	Pemerintah Daerah, Pegawai, Masyarakat		172.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>				7 Laporan	87.500.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, memperkuat pencegahan dan pemb erantasan korupsi	Pemerintah Daerah, Pegawai, Masyarakat		87.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</i>				5 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi	Pemerintah Daerah, Pegawai, Masyarakat		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>				25 Dokumen	87.500.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi	Pemerintah Daerah, Pegawai, Masyarakat		87.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</i>				3 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi	Pemerintah Daerah, Pegawai, Masyarakat		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	<i>Persentase terlaksananya kegiatan fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan</i>	-			100 %	262.500.000,00			-	-	Pemerintah Daerah, KDH, WKDH, Sekda, Asisten, Staf Ahli	-	262.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan</i>				45 Laporan	87.500.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, KDH, WKDH, Sekda, Asisten, Staf Ahli		87.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				32 Laporan	87.500.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, KDH, WKDH, Sekda, Asisten, Staf Ahli		87.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				38 Laporan	87.500.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah, KDH, WKDH, Sekda, Asisten, Staf Ahli		87.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.02	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	-			100 %	3.462.906.000,00						-	3.462.906.000,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Admnistrasi Tata Pemerintahan Yang Baik	-			100 %	670.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Organisasi Perangkat Daerah, Pegawai, Masyarakat	-	670.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				2 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Organisasi Perangkat Daerah, Pegawai, Masyarakat		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan</i>				3 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Organisasi Perangkat Daerah, Pegawai, Masyarakat		400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah</i>				4 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Organisasi Perangkat Daerah, Pegawai, Masyarakat		120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	<i>Persentase hasil kajian/evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan rakyat</i>	-			100 %	2.386.000.000,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Pemerintah Daerah, Masyarakat	-	2.386.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual</i>				7 Dokumen	1.900.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, mperkuat pencegahan dan pemb erantasan korupsi 05. Peningk atan tata kelola pem erintahan (Good Governance)	Pemerintah Daerah, Masyarakat		1.900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB</i>				5 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, mperkuat pencegahan dan pemb erantasan korupsi 05. Peningk atan tata kelola pem erintahan (Good Governance)	Pemerintah Daerah, Masyarakat		90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun</i>				540 Dokumen	96.406.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat		96.406.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
			<i>Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum</i>				2 Kasus	120.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat		120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri</i>				2 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	3. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat		90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	4.01.03	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b><i>Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan</i></b>	-			100 %	1.597.160.000,00						-	1.597.160.000,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	<i>Persentase Pencapaian Sasaran Strategis Pemkab Seruyan dalam Lingkup Bidang Perekonomian sesuai dengan Target yang telah ditetapkan Persentase Penyelesaian Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pemantauan dan Evaluasi PD/Unit Kerja Lingkup bidang Perekonomian Persentase Rekomendasi Kebijakan-Kebijakan Pengendalian Perekonomian yang di tindaklanjuti</i>	-			100 % 100 % 100 %	278.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat	-	278.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD</i>				1 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat		90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian</i>				1 Laporan	83.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat		83.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil</i>				1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, m emperkuat pencegaha n dan pemb erantasan korupsi 05. Peningk atan tata kelola pem erintahan (Good Gov ernance)	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat		60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD</i>				1 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, m emperkuat pencegaha n dan pemb erantasan korupsi 05. Peningk atan tata kelola pem erintahan (Good Gov ernance)	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat		45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	<i>Persentase Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi untuk Keselarasan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</i>	-			100 %	605.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pegawai	-	605.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah</i>				2 Dokumen	115.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pegawai		115.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan</i>				4 Laporan	250.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	3. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, m emperkuat pencegaha n dan pemb erantasan korupsi 05. Peningk atan tata kelola pem erintahan (Good Gov ernance)	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pegawai		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan</i>				2 Laporan	240.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	3. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, m emperkuat pencegaha n dan pemb erantasan korupsi 05. Peningk atan tata kelola pem erintahan (Good Gov ernance)	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pegawai		240.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	<i>Persentase Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan</i>	-			100 %	550.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	3. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pegawai	-	550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>				1 Dokumen	145.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	3. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pegawai		145.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	3. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, m emperkuat pencegahan dan pemb erantasan korupsi 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pegawai		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</i>				10 Orang	205.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	3. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, m emperkuat pencegahan dan pemb erantasan korupsi 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pegawai		205.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	<i>Jumlah kebijakan dibidang Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti daerah</i>	-			3 Dokumen	164.160.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pegawai	-	164.160.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja</i>				1 Dokumen	69.120.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pegawai		69.120.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian</i>				1 Dokumen	43.200.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pegawai		43.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan</i>				1 Dokumen	51.840.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Pegawai		51.840.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
<b>J U M L A H</b>								<b>39.018.414.494,00</b>							<b>37.494.169.623,00</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman, acuan dan tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.

Agar pelaksanaan pembangunan bisa memperoleh hasil yang maksimal khususnya yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan, maka tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang ada dan memperhatikan sinergitas antar dengan Perangkat Daerah lain. Oleh karena itu koordinasi dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan sistematis menjunjung tinggi produktivitas, disiplin, bekerja efisien dan efektif.

Dengan demikian, hasil-hasil dari perencanaan kegiatan pembangunan pada akhirnya akan dapat dirasakan dan dinikmati secara lebih adil dan merata terutama bagi seluruh lapisan masyarakat menuju Seruyan yang semakin baik..

Kuala Pembuang, 29 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SERUYAN

**Drs. H. D.JAINUDDIN NOOR, M.A.P.**

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19650821 199103 1 013